

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan ISIS dan para simpatisannya merupakan ancaman bagi keutuhan suatu negara, termasuk Indonesia. Propaganda ISIS kemudian berhasil “merekrut dan menipu” beberapa WNI yang kemudian bergabung dengan mereka di Suriah dan Irak. Ironisnya, para WNI tersebut ada yang membawa keluarga mereka, termasuk anak-anak yang masih belum cakap untuk mengerti tujuan orang tua mereka. Mengenai anak-anak tersebut, metode rehabilitasi atau deradikalisasi saja belum dapat menjamin bahwa anak-anak WNI yang pernah ikut orang tuanya bergabung dengan ISIS dapat menghilangkan paham radikalisme yang mungkin telah terdoktrin. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pemantauan perkembangan secara terus menerus dan berkesinambungan. Ada tiga dampak/risiko yang akan dihadapi jika proses rehabilitasi tidak berhasil yakni anak akan terus mencari cara untuk bergabung dengan kelompok radikal dengan sejumlah besar sel, anak yang kemudian bergabung dengan organisasi radikal, akan mencuci otak dan lebih meradikalkan teman-teman mereka di organisasi ini, dan anak dapat bergerak sendiri untuk melakukan teror.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ada keadaan di mana kebutuhan mendesak anak-anak atau remaja harus dipenuhi, tetapi penting untuk mempertahankan visi jangka panjang dalam menemukan cara bagi keluarga dan masyarakat untuk merawat dan melindungi anak-anak secara berkelanjutan. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak WNI yang bergabung ISIS. Setidaknya ada 6 (enam) tahapan sosialisasi anak-anak ke dalam jaringan teroris, yakni *seduction*, *schooling*, *selection*, *subjugation*, *specialization* dan *stationing*. Tahapan-tahapan ini dapat dijadikan indikator oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana seorang anak telah terparah paham radikalisme ISIS. Apabila pemulangan anak-anak tersebut memang dilaksanakan, maka hal yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah selain rehabilitasi adalah reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat, yang komponen

utamanya adalah pemulihan dan dukungan kesehatan dan psikososial, kesempatan pendidikan dan kejuruan, dan mengembalikan mereka ke kehidupan keluarga dan komunitas. Program dan layanan yang berfokus pada anak harus mengambil pendekatan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan dan hak individu anak, harapan dan kebutuhan keluarga dan masyarakat, dan lingkungan spesifik tempat proses reintegrasi akan berlangsung. Anak-anak Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS dihadapkan pada tantangan yang spesifik dan kompleks selama proses reintegrasi mereka, namun ini bukan hanya domain pemerintah saja, tetapi melainkan seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan mereka akan sangat bergantung pada apakah kita siap dan bersedia menerima anak-anak ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka adapun saran dan rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah agar pemerintah dalam menentukan batas usia anak-anak WNI yang ikut orang tuanya bergabung dengan ISIS, berpedoman pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, yakni di bawah 18 tahun. Terhadap mereka, penulis setuju untuk dilakukan kajian kasus per kasus atau menganalisis sejauh mana peranan anak selama mereka berada di Suriah. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah harus berkoordinasi dengan lembaga dan organisasi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak yang pernah terlibat dalam konflik di Suriah. Ini dilakukan agar apa pun kebijakan yang dihasilkan dari koordinasi tersebut tidak dianggap melanggar perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif internasional.

Masalah utama dalam pembuatan kebijakan yang akan digunakan adalah ego. Kenyataannya di Indonesia saat ini adalah sulitnya beberapa lembaga untuk bekerja sama untuk membuat satu kebijakan yang dapat menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Untuk itu, pemerintah juga harus mulai mempersiapkan lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menampung dan melakukan program rehabilitasi terhadap anak-anak tersebut. Pemerintah harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi tersebut menjadi penting untuk menghindari adanya penolakan atau konflik dengan masyarakat setempat

yang pada akhirnya justru dapat membahayakan kondisi fisik dan mental anak. Karena jika anak mengetahui adanya penolakan terhadap keberadaan mereka, dikawatirkan akan menghidupkan kembali paham radikal mereka.